

M. RIZKI. NURDIYANTO
1652011185

Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia.

Keadilan adalah salah satu dari beberapa permasalahan penting bagi suatu negara. Masalah keadilan akan selalu menjadikan perdebatan antar para ahli hukum bagaimana mewujudkan keadilan pada suatu Peraturan perundang-undangan di suatu negara. Apalagi, terdapat banyak perbedaan sistem hukum di dunia seperti sistem hukum Islamic law, Common law, Civil law dan sebagainya.

Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia terhadap Ketetapan Mahkamah Agung perjanjian baru menggariskan bahwa di Indonesia setiap perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHperdata. Tidak dipenuhinya syarat tersebut berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan bahkan perjanjian batal demi hukum perjanjian harus dibuat secara sah. Isinya lebih menguntungkan pihak yang membuat (pihak yang dominan dan menerima perjanjian (debitur).

Dimalaysia antara perjanjian dengan kontrak merupakan dua hal yang berbeda. Setiap kontrak adalah perjanjian tetapi tidak setiap perjanjian bernilai kontrak. Kontrak menimbulkan implikasi hukum.

Setiap kontrak harus memenuhi karakter kontrak yaitu ada tawaran, ada penerimaan, ada halangan atau wujudnya hubungan yang sah dan dilindungi hukum. Rebutan membuat perjanjian kontrak kepastian syarat dan penerimaan kontrak dan kemudian bebas (bukan diarah atau dipaksa) Perjanjian harus diatur dalam ~~peraturan~~ antara lain

barang 1957 dipertanyakan adanya risiko baru dalam perjanjian baru yang berisi pembatasan tanggung jawab dalam usaha, yang sangat merugikan bagi pihak yang menerima kontrak.